



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNIT KERJA : DINAS DUKCAPIL DAN KB

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIPLI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 158148

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.720.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 565 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah Seluas 952 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANJAR, WARISAN Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **110.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **187.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	250.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.175.943
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.277.175.943
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.277.175.943

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.